

ANALISIS VARIANS DAN PERTUMBUHAN BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA BITUNG

Oleh:
Christian Kainde

Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado.
email: Christian_kainde@ymail.com

ABSTRAK

Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah didanai dari beban anggaran pendapatan dan belanja. Oleh karena itu yang harus diperhatikan adalah total pendapatan yang diterima oleh daerah selama satu tahun anggaran, dibandingkan dengan kebutuhan pembiayaan dalam satu tahun akan dapat terlihat apakah anggaran yang tersedia dapat menutupi kebutuhan pembiayaan belanja atau tidak. Apabila ternyata rencana kebutuhan belanja lebih besar dari rencana pendapatan daerah, maka daerah harus berupaya menutupi kekurangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya nilai varians dan pertumbuhan belanja daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Data yang digunakan berupa data primer yang didapat dari Pemerintah Kota Bitung. Dari hasil penelitian pada Dinas Pengelola Keuangan dan Barang Pemerintah Kota Bitung dapat disimpulkan bahwa penyusunan anggaran baik, tapi penggunaan anggaran masih kurang efektif, dilihat dari Realisasi Belanja lebih kecil dari Anggaran Belanja, dan Pertumbuhan Belanja dari Pemerintah Kota Bitung dari tahun ketahun mengalami kenaikan, alasan kenaikan belanja daerah biasanya dikaitkan dengan perubahan kurs Rupiah.

Kata kunci: *anggaran, pertumbuhan belanja*

ABSTRACT

The implementation of the affairs of a government that is the authority of local funded from the burden of revenue and expenditure. Therefore to be aware of is the total revenue received by the regional for one financial year, compared with financing needs in one year will be able to look whether the available budget can cover the needs of financing expenditure or not. If it turns out the expenditure needs of the larger plan of regional income plan, then the region should strive to cover the shortfall. This research aims to know the amount of the value variance and spending growth region. The research method used is descriptive analysis method. The data used of primary data obtained from Bitung city government. From the results of research on the Financial Management and Goods Bitung city government can be concluded that the preparation of the budget good, but it used less effective, seen from smaller than realization of spending budget, and growth of spending from of the Bitung city government increased from years, the reason of increase expenditure area usually associated with changes of exchange rate of Rupiah.

Keywords: *budget, spending growth*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Reformasi pada aparat pemerintah telah menuntut diwujudkannya akuntabilitas instansi pemerintah, yang merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Otonomi daerah merupakan salah satu contoh dari reformasi pemerintah dalam menunjang perkembangan dari setiap daerah/wilayah yang ada di Indonesia Adisasmita (2011:27).

Peraturan Pemerintah No 24 tahun 2005, sistem akuntansi pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dalam operasi keuangan pemerintah. Adanya sistem akuntansi pemerintahan sangat membantu setiap daerah dalam mengelola serta mengetahui posisi keuangan dari setiap daerah.

Untuk mendukung terwujudnya *good governance*, maka pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan pokok yang telah ditetapkan dalam undang-undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah didanai atas beban anggaran pendapatan dan belanja. Oleh karena itu yang pertama harus diperhatikan adalah seberapa besar total pendapatan yang diterima daerah selama satu tahun anggaran. Dengan diketahuinya total pendapatan yang diperkirakan diterima selama satu tahun anggaran, maka setelah dibandingkan dengan kebutuhan pembiayaan dalam tahun yang bersangkutan dapat terlihat apakah anggaran yang tersedia dapat menutupi kebutuhan pembiayaan (belanja) atau tidak. Apabila ternyata rencana kebutuhan belanja lebih besar dari rencana pendapatan daerah, maka daerah harus berupaya menutupi kekurangan (*deficit*) tersebut.

APBD adalah merupakan suatu rencana operasional keuangan daerah, disatu pihak menggambarkan penerimaan pendapatan dan dilain pihak merupakan pengeluaran untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dalam satu tahun anggaran. APBD juga merupakan instrument yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah Adisasmita (2011:62).

Standar Analisa Belanja (SAB) adalah standar atau pedoman yang digunakan untuk menganalisa kewajaran beban kerja atau biaya setiap program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu satuan kerja dalam satu tahun anggaran Adisasmita (2011:83). Analisis belanja daerah dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien dan efektif (*value for money*). Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintah sesungguhnya dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mewujudkan *good governance*. Alasannya adalah terpenuhinya tiga elemen *good governance* yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi Mahmudi (2010:156).

Anggaran belanja yang diterima oleh setiap instansi pemerintah daerah tentunya dapat menunjang pertumbuhan belanja daerah guna dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari setiap Kota/Kabupaten yang ada di Indonesia. Kota Bitung merupakan salah satu kota yang ada di Indonesia yang mendapatkan predikat Laporan Keuangan “Wajar Dengan Pengecualian” pada tahun 2006 sampai tahun 2010. Pada tahun 2012 pemerintah Kota Bitung mendapatkan Predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” dengan tahun anggaran 2011. Selain hal tersebut Kota Bitung dalam beberapa tahun terakhir juga mengalami perkembangan misalnya dalam bidang sosial dan sarana prasarana umum yang ada. Melihat hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang nilai rata-rata pertumbuhan anggaran belanja daerah yang terjadi pada Pemerintah Bitung dari Tahun 2008-2012.

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui besarnya analisis varians dan pertumbuhan anggaran belanja daerah pada Dinas Pengelola Keuangan dan Barang Milik Pemerintah Kota Bitung.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Sektor Publik

Istilah sektor publik lebih tertuju pada sektor negara, usaha-usaha negara, dan organisasi nirlaba negara. Sektor publik adalah pemerintah dan unit-unit organisasinya, yaitu unit-unit yang dikelola pemerintah dan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak atau pelayanan masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Dengan demikian, cukup beralasan bahwa istilah sektor publik dapat berkonotasi perpajakan, birokrasi, atau pemerintah. Akuntansi sektor publik adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka penyediaan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota) guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan Mardiasmo (2009:54).

Sistem akuntansi pemerintahan daerah menurut Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 meliputi serangkaian prosedur, mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan, dan peringkasan atas transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Analisis Anggaran

Anggaran adalah perencanaan keuangan untuk masa depan yang pada umumnya mencakup jangka waktu satu tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Anggaran ini merupakan perencanaan jangka pendek organisasi yang menerjemahkan berbagai program kedalam rencana keuangan tahunan yang lebih kongkret. Usulan anggaran pada umumnya telah terlebih dahulu oleh pejabat yang lebih tinggi untuk bisa dijadikan anggaran formal. Penyusunan anggaran pada organisasi sektor public dapat membantu mewujudkan akuntabilitas. Berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan, masyarakat secara tidak langsung dapat melakukan pengawasan atau pengendalian Mahsun (2012:145).

Analisis Belanja Daerah

Pemerintah daerah harus mengalokasikan belanja daerah secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaan anggaran belanja perlu diperhatikan penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai; penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.

Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih (ekuitas dana) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2011, belanja daerah disusun berdasarkan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata, agar relatif dapat dinikmati oleh masyarakat, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Oleh karena itu dalam penyusunan APBD Tahun anggaran 2011, Pemerintah Daerah menetapkan target capaian baik dalam konteks daerah, satuan kerja, dan kegiatan sejalan dengan urusan yang menjadi kewenangannya.

Analisis belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien dan efektif. Mahmudi (2010:156) menyatakan bahwa analisis belanja daerah digunakan untuk melihat sejauh mana pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran. Berdasarkan informasi pada Laporan Realisasi Anggaran kita dapat membuat analisis anggaran khususnya analisis belanja antara lain analisis belanja varians belanja, analisis pertumbuhan belanja, analisis keserasian belanja, rasio efisiensi belanja dan rasio belanja terhadap PDRB (Mahmudi 2010:156).

Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara yang memungkinkan pengukuran belanja tersebut. Dalam laporan realisasi anggaran, klasifikasi yang digunakan adalah klasifikasi ekonomi. Untuk kelompok belanja, yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan transfer. Kelompok-kelompok belanja adalah sebagai berikut Mursyidi (2009:299) :

- a. Belanja operasi
Pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Kelompok belanja operasi terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan.
- b. Belanja modal
Pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal termasuk : belanja tanah; belanja peralatan dan mesin; belanja modal gedung dan bangunan; belanja modal jalan , irigasi, dan jaringan; belanja aset tetap lainnya; dan belanja aset lainnya.
- c. Belanja tidak terduga
Kelompok belanja lain-lain/tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.
- d. Transfer
Keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, muncul kelompok belanja transfer. Adapun yang dimaksud dengan transfer di sini adalah transfer keluar, yaitu pengeluaran uang dari entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

Analisis Varians Belanja Daerah

Terdapat ketentuan bahwa anggaran belanja merupakan batas maksimum pengeluaran yang boleh dilakukan pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah akan dinilai baik kinerja belanjanya apabila realisasi belanja tidak melebihi yang dianggarkan. Analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran.

Varians belanja daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Varians} = \text{Realisasi Belanja} - \text{Anggaran Belanja}$$

Sumber : Mardiasmo(2009:70).

Analisis varians cukup sederhana namun dapat memberikan informasi yang sangat berarti. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan, pembaca dapat mengetahui secara langsung besarnya varians anggaran belanja dengan realisasinya yang bisa dinyatakan dalam bentuk nilai nominalnya atau persentasenya. Selisih anggaran belanja dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu : 1) selisih disukai (*favourable variance*), 2) selisih tidak disukai (*unfavourable variance*). Dalam hal ini realisasi belanja lebih kecil dari anggarannya maka disebut *favourable variance*, sedangkan jika realisasi belanja lebih besar dari anggarannya maka dikategorikan *unfavourable variance*.

Selisih realisasi belanja dengan yang dianggarkan yang cukup signifikan bisa memberikan dua kemungkinan, pertama hal itu menunjukkan adanya efisiensi anggaran. Kedua justru sebaliknya, jika terjadi selisih kurang maka sangat memungkinkan telah terjadi kelemahan dalam perencanaan anggaran sehingga estimasi belanjanya kurang tepat, atau tidak terserapnya anggaran tersebut bisa jadi disebabkan karena ada program dan kegiatan yang tidak dilaksanakan eksekutif padahal sudah diamanatkan dalam anggaran. DPRD perlu melakukan penelusuran dan konfirmasi langsung dengan pihak eksekutif sehingga bisa menilai apakah selisih tersebut menunjukkan kinerja anggaran yang baik atau hanya karena anggaran yang ditetapkan kurang efisien.

Analisis Pertumbuhan Belanja

Bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Alas an kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cakupan layanan, dan penyesuaian faktor makro ekonomi. Namun demikian dengan paradigma baru otonomi daerah, pemerintah daerah harus dapat mengendalikan belanja daerah, melakukan efisiensi belanja dan penghematan anggaran. Analisis pertumbuhan belanja dilakukan untuk mengetahui berapa besar pertumbuhan masing-masing belanja, apakah pertumbuhan tersebut rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertumbuhan belanja harus diikuti dengan pertumbuhan

pendapatan yang seimbang, sebab jika tidak maka dalam jangka mencegah dapat mengganggu kesinambungan dan kesehatan fiskal daerah. Pertumbuhan belanja daerah dapat dihitung dengan rumus berikut :

$$\text{Pertumbuhan Belanja Thn } t = \frac{\text{Realisasi Belanja Thn } t - \text{Realisasi Belanja Thn } t-1}{\text{Realisasi Belanja Thn } t-1}$$

Sumber : Mahmudi (2011:162)

Penelitian Terdahulu

Sularso (2011), Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah. Kesamaan dengan penelitian ini adalah pada pembahasan mengenai rasio pertumbuhan belanja, tetapi penelitian ini juga membahas rasio varians antara anggaran dan realisasi.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Kuncoro (2009:124) menyatakan bahwa data adalah sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif berupa ulasan mengenai sejarah Pemerintah Kota Bitung dan data kuantitatif berupa Laporan Realisasi Anggaran dari Dinas Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Bitung Tahun Anggaran 2009-2012.

Teknik Pengumpulan Data

Beberapa dokumen dan arsip yang relevan yang dapat dibuat dari catatan atau dokumen yang ada seperti struktur organisasi Dinas Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah dan laporan realisasi anggaran Interview/ wawancara Metode ini dilakkukan dengan pihak yang bersangkutan Kepala Bidang Akuntansi

Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, dimana penelitian dilakukan dengan mengumpulkan laporan keuangan periode 2009 – 2010, dan menganalisa data yang dikumpulkan serta memberi keterangan-keterangan yang dihadapi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Tabel 4.1 Laporan Realisasi Anggaran Belanja Berdasarkan Analisis Varians

No	Uraian	Anggaran Tahun 2009	Realisasi Tahun 2009	Varians	
				Rp	%
	Belanja				
	BELANJA OPERASI				
1	Belanja pegawai	237.116.862.388	221.110.026.200	(16.006.836.188)	6.76
	Belanja barang	65.747.607.335	63.873.652.366	(1.873.954.969)	2.86
	Bunga	507.627.137	507.627.137	-	-
	Subsidi	-	-	-	-
	Hibah	1.533.029.000	1.489.339.000	(43.630.000)	2.85
	Bantuan Sosial	11.998.589.500	11.996.387.000	(2.202.500)	0.01
	Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	Jumlah belanja operasi	316.903.715.360	298.977.031.703	(17.926.683.657)	5.66
		BELANJA MODAL			
2	Belanja tanah	764.004.000	460.008.650	(303.995.350)	39.79
	Belanja peralatan dan mesin	25.843.400.625	25.288.676.168	(554.724.457)	2.15
	Belanja gedung dan bangunan	25.425.103.000	25.395.663.045	(29.469.995)	0.12
	Belanja jalan, irigasi, dan jaringan	45.495.152.451	45.293.478.650	(201.673.801)	0.45
	Belanja aset tetap lainnya	358.400.000	352.635.000	(5.765.000)	1.61
	Belanja aset lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	97.913.060.076	96.790.461.513	(1.122.598.563)	1.15
	BELANJA TAK TERDUGA				
3	Belanja tak terduga	1.500.000.000	1.500.000.000	-	-
	Jumlah belanja tak terduga	1.500.000.000	1.500.000.000	-	-
	Total belanja	416.316.775.436	397.263.093.216	(19.053.682.220)	4.58

Sumber : Data Olahan Tahun 2013

Analisis Pertumbuhan Belanja

Tabel 4.2 Analisis Pertumbuhan Belanja

No	Uraian	Realisasi Tahun 2009	Realisasi Tahun 2010	Pertumbuhan	
				Kenaikan Penurunan	%
	BELANJA				
	BELANJA OPERASI				
1	Belanja pegawai	221.110.026.200	258.050.402.966	36.940.376.766	16.70
	Belanja barang	63.873.652.366	60.295.991.649	(3.577.660.717)	(5.60)
	Bunga	507.627.137	252.000.000	(255.627.137)	(50.35)
	Subsidi	-	-	-	
	Hibah	1.489.339.000	13.584.299.300	12.094.960.300	81.21
	Bantuan Sosial	11.996.387.000	11.148.849.041	(847.537.959)	(7.06)
	Bantuan Keuangan	-	-	-	
	Jumlah belanja operasi	298.977.031.703	343.331.542.956	44.354.511.253	14.83
		BELANJA MODAL			
2	Belanja tanah	460.008.650	200.160.000	(259.848.650)	(56.48)
	Belanja peralatan dan mesin	25.288.676.168	26.819.720.750	1.531.044.582	6.05
	Belanja gedung dan bangunan	25.395.663.045	32.727.741.675	7.332.078.630	28.87
	Belanja jalan, irigasi, dan jaringan	45.293.478.650	52.676.429.600	7.382.950.950	16.30
	Belanja asset tetap lainnya	352.635.000	1.149.079.000	796.444.000	22.58
	Belanja aset lainnya	-	-	-	
	Jumlah Belanja Modal	96.790.461.513	113.573.131.025	1.878.266.512	1.94
		BELANJA TAK TERDUGA			
3	Belanja tak terduga	1.500.000.000	2.819.362.813	1.319.362.813	87.95
	Jumlah belanja tak terduga	1.500.000.000	2.819.362.813	1.319.362.813	87.95
	Total belanja	397.263.093.216	459.724.036.794	62.460.943.578	15.72

Sumber: Data Olahan Tahun 2013

Pembahasan

Tabel 4.3 Anggaran Belanja Daerah

Tahun	Anggaran	Realisasi	Varians	%
2009	416.316.775.436	397.263.093.216	19.055.662.220	95.42
2010	476.707.940.392	459.724.036.794	16.983.903.598	96.43
2011	498.831.311.058	483.991.924.455	14.839.386.603	97.02
2012	559.008.942.280	538.645.556.073	20.363.386.207	96.35

Sumber: Data Olahan Tahun 2013

Dari Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah yang tampak pada tabel diatas dapat diketahui terdapat selisih antara realisasi dengan anggaran yang ada. Dapat dilihat bahwa realisasi belanja yang terjadi lebih kecil dibandingkan dengan anggaran belanja yang sudah ditetapkan. Tahun 2009 nilai varians sebesar Rp. 19.055.662.220 atau 95.42% dari total APBD, tahun 2010 juga nilai varians sebesar Rp.16.983.903.598 atau 96.43% dari total APBD, tahun 2011 juga nilai varians sebesar Rp. 14.839.386.603 atau 97.02% dari total APBD, dan tahun 2012 nilai varians sebesar Rp. 20.363.386.207 atau 96.35 % dari total APBD. Pada tahun 2009 sampai tahun 2012 terdapat selisih antara anggaran belanja dan realisasi. Jumlah penghematan tersebut jika dilihat dari presentasinya tidak begitu besar namun jika dilihat dari nilai nominalnya cukup signifikan. Namun pada dasarnya kinerja dari pemerintah dapat dikatakan baik, dikarenakan adanya penghematan anggaran.

Secara umum terjadinya varians karena terdapatnya selisih yang cukup signifikan antara perencanaan anggaran belanja dan realisasi anggaran belanja daerah pada tahun 2009 – 2012. Jika dilihat dari selisih yang cukup signifikan, sangatlah mungkin terjadi kelemahan dalam perencanaan anggaran sehingga perkraan dalam belanjanya kurang tepat, atau tidak terserapnya anggaran tersebut bisa jadi disebabkan ada program dan kegiatan yang tidak dilaksanakan padahal sudah direncanakan dalam anggaran yang pada intinya sisa dari penghematan tersebut bisa disalurkan ke pos-pos belanja yang masih kurang.

Secara normatif, anggaran belanja merupakan batas tertinggi dalam pengeluaran yang boleh dilakukan. Kinerja pemerintah daerah dinilai baik apabila pemerintah daerah mampu melakukan efisiensi belanja. Sebaiknya jika realisasi belanja lebih besar dari jumlah yang dianggarkan maka hal itu mengindikasikan adanya kinerja anggaran yang kurang baik.

Tabel 4.4 Pertumbuhan Belanja Daerah (Rupiah)

No	Uraian	2010	2011	2012
1	Belanja Operasi	44.354.511.253	36.673.587.227	29.006.572.197
2	Belanja Modal	1.878.266.512	(10.315.520.553)	25.723.062.929
3	Belanja Tak Terduga	1.319.362.813	(2.090.179.013)	326.277.000
TOTAL BELANJA		47.552.140.578	24.267.887.661	55.055.912.126

Sumber: Data Olahan 2013

Tabel 4.5 Pertumbuhan Belanja Daerah (%)

No	Uraian	2010	2011	2012
1	Belanja Operasi	14.83	10.68	7.63
2	Belanja Modal	1.94	(9.08)	25.09
3	Belanja Tak Terduga	87.95	(74.13)	44.74

Sumber: Data Olahan Tahun 2013

Pertumbuhan belanja daerah tahun 2009 – 2012 dari tahun ke tahun mengalami kenaikan pertumbuhan yang ditujukan berdasarkan nilai nominal dari total belanja yang diperoleh setiap tahunnya memiliki nilai positif. Ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah dalam menyusun anggarannya mengalami pertumbuhan belanja setiap tahunnya. Alasan kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan perubahan kurs rupiah, dan harga minyak. Pertumbuhan anggaran belanja tertentu bisa saja negatif atau lebih kecil dari tahun sebelumnya jika memang belanja tersebut tidak prioritas untuk tahun sekarang. Anggaran tertentu yang tidak menambah nilai bisa dihilangkan dan dialihkan untuk belanja lain yang prioritasnya lebih penting. Prinsipnya pertumbuhan belanja daerah harus terencana dan terkendali dengan baik agar kesinambungan dan stabilitas fisik daerah terjaga.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pemerintah Kota Bitung mempunyai prosedur penyusunan anggaran yang baik, tetapi dalam pelaksanaan masih kurang efektif, dilihat dari hasil penelitian dapat diketahui terdapat selisih negatif antara Realisasi Belanja dan Anggaran Belanja Daerah, dimana Relisasi Belanja lebih kecil dari Anggaran Beanja yang sudah ditetapkan.
2. Dari hasil penelitian pertumbuhan belanja daerah dari tahun 2009 sampai tahun 2012 mengalami kenaikan. Ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah dalam menyusun anggarannya mengalami pertumbuhan belanja setiap tahunnya, alasan kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan perubahan kurs dan harga minyak.

Saran

1. Perencanaan anggaran harus dilaksanakan dengan kebijakan antara anggaran dan realisasi.
2. Dalam penyusunan anggaran belanja, hendaknya memperhatikan situasi dan kondisi, agar anggaran yang sudah disusun dapat direalisasikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Graha Ilmu. Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Edisi 3. Penerbit Erlangga. Jakarta
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi ke – 2. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mahsun, Mohamad. 2012. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE. Yogyakarta
- Mardiasmo. 2009. *Otonomi dan Manajemen keuangan daerah*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mursyidi. 2009. *Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia*. Penerbit PT. Refika Aditama. Bandung
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sipkd.jakarta.go.id/sipkd-dki/pp/permendagri_13_2006.pdf
- Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
[www.itjen.depkes.go.id/public/upload/unit/pusat/files/Peraturan_Pemerintah/pp2005_24\(SAPmrth\).pdf](http://www.itjen.depkes.go.id/public/upload/unit/pusat/files/Peraturan_Pemerintah/pp2005_24(SAPmrth).pdf)
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No.37 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2011
hukum.unsrat.ac.id/men/mendagri2010_37.pdf
- Sularso. 2011. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah. *Skripsi*. Universitas Jendral Soedirman. Semarang.
- UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
www.dikti.go.id/files/atur/pnbp/UU17-2003KeuanganNegara.pdf

FAKULTAS EKONOMI